



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN





**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JALAN ELTARI TELP.NOMOR:(0382)2426122

e-Mail : perpusdasikka@gmail.com

M A U M E R E

KODE POS : 86113

**KEPUTUSAN KEPADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN
2025 – 2029**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum
..... Keputusan Bupati Sikka tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 -2029 perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Sikka tentang Indikator Kineja Utama Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Uang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka' (Berita Daerah Kabupaten Sikka Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026;
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029;
12. Keputusan Bupati Sikka Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 -2029.
13. Keputusan Bupati Sikka Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 -2029.

Memutuskan :

Menetapkan :
Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Eencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka
- Keempat : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maumere

Pada Tanggal , 3 Nopember 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Sikka



LUKAS LAWE, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19710302 199201 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ IKU	Penjelasan/Alasan/ Formula Perhitungan	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	TAHUN					Penanggung jawab	Sumber Dana
							2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	"(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif berbasis Kearifan Lokal serta Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	IPLM merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.Formula perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2025 didasarkan pada dua dimensi utama yaitu Kepatuhan dan Kinerja dengan Rumus Perhitungan Indeks : $IPLM=((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan})+(0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$			Indeks	51.61	54,71	57,23	59,04	61,61	DISARPUS	APBD/APBN
		Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	TGM/TKM merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tngkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Rumusan Perhitungan TGM/TKM : $TGM/TKM=((0,15\% \text{ Pra Membaca})+(0,50\% \text{ Saat Membaca})+(0,35\% \times \text{Pasca Membaca}))$			Nilai	65.53	66,51	67,94	68,68	69,71		
				Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)	Nilai	65.53	66,51	67,94	68,68	69,71		APBD/APBN
				Kegiatan Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Prosentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	Persentase	100	100	100	100	100		APBD/APBN
				Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	Perpustakaan	23	2	0	10	10		
				Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Perpustakaan	11	3	24	24	24		

				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Perpustakaan	2	3	5	5	6		
				Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	Eksemplar	15000	15000	15000	15000	15000		
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	Orang	30	30	30	30	30		
				Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	Jumlah	3	3	3	3	3		
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	Eksemplar	4000	15000	0	1500	1500		
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	Eksemplar	0	30	10	10	10		
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	Perpustakaan	3	4	6	6	6		
				Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	Persentase	100	100	100	100	100		APBD/APBN

				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	Perpustakaan	0	1	1	1	1		
				Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang	Perpustakaan	9	25	0	23	23		
				Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten	Orang	118	120	50	50	50		
				Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	Lokus	42	60	37	40	40		
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	Persentase	100	100	100	100	100		APBD/APBN
				Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	Eksemplar	8	0	10	12	14		
				Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (%)	Persentase	100	100	100	100	100		APBD/APBN

				Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksemplar	0	0	15	15	15		
				Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	Eksemplar	0	0	15	15	15		
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Formula Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah dihitung dengan menjumlahkan skor dari dua komponen utama yaitu Oengelolaan Srsip Dinamis dan Sumber Daya Kearsipan. Rumus Perhitungan : Nilai Akhir = Skor Pengelolaan Arsip Dinamis x W1) +(Skor Sumber Daya Kearsipan x W2)			Nilai	28.86	36,07	48,69	53,56	58,92		
				Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Kabupaten/ Kota (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	Berkas	35	30	30	30	30		
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	Berkas	30	100	150	160	160		
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	17	11	11	11	11		
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	Unit	0	0	2	2	2		
				Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	Lembaga	11	0	11	11	11		

				Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	1	1		
				Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	Instansi	0	12	12	12	12		
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	Arsip	5	5	5	5	5		
				Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	Pengguna	0	0	30	30	30		
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	3	3	3	3	3		
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dilakukan	Persentase	100	100	100	100	100		

				Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	Arsip	100	75	75	75	75		
				Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang	Persentase	100	100	100	100	100		
				Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	Daftar	2	2	2	2	2		
				Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	Arsip	0	0	10	10	10		
				Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang dilakukan Autentikasi (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	Arsip	0	0	10	10	10		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD adalah angka atau kategori hasil penilaian komprehensif terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tingkat daerah mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.			Nilai	73.5	74,80	76,50	77,20	78,40		

				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	12	12	12		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	12	12	12	12		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12	12	12	12		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	1	1	1		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	3	3	3	3	3		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	1	1	1		

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	0	0	10	18	18		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	2	2	2	2	2		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	2	18	18	18	18		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang urusan	Persentase	100	100	100	100	100		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	0	0	0		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	6	0	0		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	0	4	2		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	12	12	12		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	12	12	12		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (%)	Persentase	100	100	100	100	100		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	0	0	1	1	1		

				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	6	6	6	7	7		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	14	12	12	12	12		

Maumere, 18 Desember 2028

Kendala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Maumere, 18 Desember 2028
LAWE, S. , S.Sos
Pembina Utyama Muda
NIP. 19710302 199201 1 003

